Dear Pak Rhiza,

Tulisan dalam format PDF sudah saya print terdiri atas 5 halaman dan terbagi menjadi 18 alinea.

Koreksi-koreksi saya buat berdasarkan alinea-nya sbb:

**Koreksi pada alinea-1sampai dengan alinea-10: tidak ada.**

**Koreksi pada alinea ke-11:**

Kelemahan CMI waktu itu adalah ketergantungannya kepada TELKOM yang hampir dilayaninya sebagai “single customer”. Karena itu, sambal menciutkan “size-nya”, CMI melebarkan sayap bisnis dan pemasaranya kemanca negara. Tetapi yang dibidik lebih focus adalahg Kemenhan dan TNI, dengan alasan-alasan: (1) CMI sudah terlanjur menguasai teknologi rf&microwave yang merupakan bagian dari seluruh senjata berat dan modern pada saat ini. (2) diketahui bahwa peralatan elektronika ….. dst … dst… tetap seperti tulisan yang sudah ada.

**Koreksi pada alinea-12 : tidak ada.**

**Koreksi pada alinea-13:**

Di dunia, ternyata hanya sedikit perusahaan yang bermain didunia rf&microwave sedangkan di Indonesia hanya CMI, apalagi kedalam peralatan militer seperti radar, alat komuniukasi taktis dan control pengendalian. Dengan modal hasil-hasil riset selama lebih dari 20 (duapuluh) tahun CMI ingin menempatkan diri sebagai salah satu produsen yang mandiri dan mengakar dinegeri yang berbendera MERAH PUTIH ini, oleh karenanya pada tahun 2000 an CMI mulai membangun kerjasama dengan pihak Amerika yang diketahui sebagai sumber komponen dan teknologi elektronika terbesar didunia diantaranya adalah Lockheed Martin Corporation sehingga CMI harus berurusan dengan Pentagon segala. Seperti gayung bersambut keinginan CMI dibarengi dengan berdirinya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berlanjut dengan dikeluarkanya Undang-Undang No.16/2012 tentang Industri Pertahanan. Mengetahui CMI sebagai satu-satunya industry yang seperti ini, KKIP menyarankan agar CMI menetralkan diri dengan memutuskan hubungan dengan Lokheed Martin secara baik-baik agar Pemerintah R.I. nantinya bisa menggunakan CMI sebagai wadah untuk menampung teknologi-teknologi jika Pemerintah membeli barang yang tidak berasal dari Amerika Serikat. Namun sayang bahwa rencana Pemerintah untuk melibatkan CMI jika membeli barang dari luar negeri malah tidak dilakukan sampai saat ini.

**Koreksi alinea ke-14:**

Sementara itu, CMI terus membuktikan jati dirinya sebagai produsen peralatan dibidang ***transmisi radio rf&microwave*** untuk melayani kebutuhan-kebutuhan khusus yang murni MERAH PUTIH dengan cara-cara penguasaan teknologi sendiri yang sangat mendasar yaitu dimulai dari level modul yang ahirnya berujung pada system. Setelah berkiprah selama 30 tahun banyak teknologi berhasil dikuasai dan beberapa perangkat/produk berhasil diciptakan. Produk tersebut adalah berbagai jenis radio diantaranya tactical radio (manpack – radio), Integrated Minitoring and Control System (IMC2-S) yang merupakan pengembangan dari IMAC hasil ciptaan tahun 1995 serta modul-modul utama untuk radar.

**Koreksi alinea ke-15:**

Baru-baru ini CMI mendapat pekerjaan BAKAMLA yang idenya diawali dengan pembangunan backbone telekomunikasi satelit namun karena adanya berbagai penambahan sehingga akhirnya tercipta produk **IMC2-S** sebagai produk yang lebih advance dari IMAC. Walaupun feed atau sensor dari IMC-2S ini belum semua tersedia namun produk ini sudah bisa memantau dan mengakuisisi data dan pengendalikan perangkat yang terhubung padanya sehingga menjadikanya IMC2-S sebuah Command Center. Tanpa disadari ternyata IMC2-S merupakan Command Center yang lengkap yang dapat digunakan sebagai C4ISR atau lebih kerenya lagi perangkat untuk Network Centrix Warfare (NCW) bagi kesatuan-kesatuan TNI. CMI hanya mendapat pekerjaan IMC2-S nya saja, sedangkan peralatan sensor (antarmuka) ditenderkan secara terpisah pengadaannya. Perangkat antarmuka ini bisa dipilih secara bebas tidak tergantung sama sekali dengan IMC2-S, namun untuk menggabungkanya nanti diperlukan modul interface yang disebut **“mediation device”** yang dibuat secara khusus setelah diketahuinya jenis protocol yang dipergunakan oleh perangkat antarmuka tersebut.

**Koreksi alinea ke-16:**

Nah celakanya, diantara pemasok perangkat antarmuka itu ternayta ada makelar ecek-ecek. Mereka memasok dengan cara-cara yang kurang baik, berbau mark-up dan bahkan kena OTT suap menyuap. Karena CMI yang membuat Center command-nya, maka CMI disangka juga yang mengkoordinir pengadaan perangkat peripheral dan interface nya. Padahal proses pengadaannya benar-benar terpisah. CMI dalam proses pengadaan “command center” ini TIDAK menjadi ”koordinator” seperti misalnya PNRI yang menjadi ketua konsorsium dalam kasus e-KTP, sehingga seluruh permasalahan yang terjadi dalam pengadaan2 laenya memang otomatis jadi tanggung jawab PNRI juga.

**Koreksi alinea ke-17:**

Proses pengadaan perangkat2 periperal dan interface yang nantinya terhubung ke central command ini musti diperhatikan dan dikaji lebih serius, bukan hanya dari sisi pidana korupsi-nya saja. Musti dipikirkan, bagaiman Indonesia mau selamat kalo central command ini sudah MERAH PUTIH murni, tapi perangkat2 periperal dan interface yang terhubung ……………..

…………… nggak tau lagi …. tapi intinya :

1. Indonesia belum punya “protocol nasional” sehingga banyak peripheral yang mengunci proses pengadaan agar selalu beli ke pabrik itu2 lagi.
2. Banyak kontraktor ecek2 yang tidak punya latar belakang engineering dan juga memang tidak mau memiliki kegiatan engineering yang mahal itu. Akibatnya jika command center tersebut sudah MERAH PUTIH dan apalagi menutup jalan kontraktor ecek2 itu …. Maka pabrikan command center tersebut bisa menjadi musuh banyak pihak.